

Pancasila Enterprise Theory and Pancasila Bottom Line: Suatu Kajian Mengakuisisi Akuntansi Ke-Indonesia-an dari Jeratan Kapitalisme

Arrayyan Firdaus¹

¹Accounting Department, State Polytechnic of Malang 65141
E-mail : arrayyanfirdaus@email.com

ABSTRACT

The purpose of this study is to initiate the presence of Indonesian accounting practices that are free from the shackles of capitalism. This study uses the spirit of postmodern paradigm in which the style of deconstruction Derrida with nuance local wisdom is based the values of Pancasila. Manifestation of Pancasila in the frame of the accounting entity concept and the bottom line consist of two phases: theoretical analysis and practical stage. The theoretical analysis phase consists of problem formulation and methodological selection, examining and then reconstructing the theoretical philosophical framework from the concept of the accounting entity and the bottom line, based on the perspectives of Pancasila which make the new concept called Pancasila Enterprise Theory (PET) and Pancasila Bottom Line (PBL). Furthermore, empirical analysis phase consists of depth processes on issues related to implementation of the three last accounting entity concepts, interpreting each meaning and role of the precepts of Pancasila in life processes, and re-actualization Pancasila in accounting sciences. The concept of PET and PBL is then regarded as a sign of the new gold era of accounting based on Pancasila or couldbe called by the birth of Pancasila accounting practices that have been liberated from capitalism.

Key words: Postmodern Pardigm, Pancasila, PET, PBL, and Pancasila Accounting.

1. PENDAHULUAN

Telah banyak jurnal, buku bacaan, kajian diskusi di ruangan seminar, konferensi, dan dikelas yang menyebutkan bahwa pergerakan *roadmap* akuntansi di Indoensia adalah produk budaya barat/kapitalisme (sehingga disebut dengan akuntansi modern/*mainstream*). Salah satu buktinya, Mulawarman (2011: xvii) telah mengungkapkan bahwasanya semua standar akuntansi di Indonesia telah berinduk pada landasan teoritis *International Accounting Standards Committee* (IASC) dengan judul “Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan” dalam bentuk Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia [1]. Bahkan seolah tidak belajar dari kesalahan, dalam penyusunan kode etik, IAI juga tidak lepas atas proses pengadopsian dari badan internasional penyusun standar praktik akuntansi lainnya yaitu *International Federation of Accountant* (IFAC) (Lihat Ludigdo dan Kamayanti, 2012; dan Agus dan Ardana, 2014: 161) [2, 3].

Kepragmatisan sistem akuntansi di Indonesia untuk selalu tunduk pada perintah budaya barat setidaknya dapat diteropong dari beberapa konsep dasar akuntansi khususnya pada konsep entitas akuntansi (*entity accounting*) yang kemudian menjadi jebakan sosiologis bagi masyarakat Indonesia. Hal ini disebabkan karena secara lahiriah, sifat karakteristik dari konsep entitas akuntansi secara derivatif akan merepresentasikan tujuan pengungkapan pelaporan keuangan dan kepentingan dari para pemakainya. Adalah sesuatu yang wajar jika kemudian, teori entitas mampu menentukan kalangan mana saja yang sekiranya dianggap paling berkepentingan dalam suatu aktifitas ekonomi.

Melalui beberapa literatur yang membahas tentang teori akuntansi, setidaknya diperoleh delapan konsep besar dasar

teoritis akuntansi yakni *proprietary theory*, *entity theory*, *residual equity theory*, *fund theory*, *commander theory*, *investor theory*, *enterprise theory*, dan *syariah enterprise theory* (Lihat Belkaoui, 2000: 106-107; Kam, 1990; Hendriksen dan Sinaga, 1994; Triyuwono, 2001: 136-140; Swardjono, 2005: 495; dan Mulawarman, 2011: 67-96) [4-9]. Namun, konsep dasar teoritis akuntansi yang paling viral hanyalah tiga macam yaitu *proprietary theory*, *entity theory*, dan *enterprise theory*. Alhasil, secara runtutan kronologis, konsep entitas setidaknya mengalami perombakan sebanyak tiga kali, dari *proprietary theory* yang dianggap tidak cocok karena menganggap pemilik sebagai sentral segala jenis kepentingan sehingga seringkali terjadinya perilaku tidak etis, *self-interest*, dan moral hazard, menuju konsep *entity theory* (Lihat juga Tuanakotta, 1986; Belkaoui, 2000; Triyuwono, 2002: 2; Godfrey dan Hodgson, 2010; dan Mulawarman, 2011; 70) [10-14].

Namun, seiring bergulirnya waktu konsep *entity theory* menjadi semakin sarat akan nilai egoistik, individualistik, dan opportunistic yang digunakan untuk membantu para pemilik modal memperoleh laba yang maskimal dan pengambilan keputusan yang tepat pada modal yang ditanam (Lihat Kam, 1990: 305-306; Triyuwono, 2002: 5 Anthony et al. 2003: 31; dan Belkaoui 2005: 176) walaupun fokus utama dari konsep ini telah bergeser dari pemilikny ke arah perusahaan (Lihat Swardjono, 2005: 498; dan Djajanegara, 2008: 11) [15-20]. Artinya, walaupun konsep ini telah dimodifikasi secara luas dari konsep *proprietary theory*, keduanya memiliki kesamaan pada basis ideologi yang mendasarinya yaitu ideologi kapitalisme (Lihat Triyuwono, 2002: 330-331; dan Setiabudi dan Triyuwono

2002: 165-166) [21, 22]. Bisa dikatakan kedua konsep ini adalah hasil unifikasi dari kekuasaan ekonomi kapitalis.

Urgensi memahami kegagalan konsep *entity theory* yang masih bersifat *profit oriented*, pada yang waktu hampir bersamaan lahir konsep *enterprise theory*. *Enterprise theory* menurut Mulawarman (2011: 95) memiliki penekanan yang berbeda yakni perusahaan sebagai organisasi nasional dituntut akan kehadirannya sebagai pelaku pertanggungjawaban sosial (Tuanakotta, 1986: 179; Kam, 1990: 315-318) sehingga ditambahkan Harahap (2002) bahwa teori ini terbilang melengkapi kedua teori entitas sebelumnya [22-25]. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi adanya *euforia* aktivitas pendistribusian laba kepada para *stakeholders*. Dilain pihak, akuntansi dalam ranah kritis, seperti akuntansi sosial dan lingkungan secara ekstrem mengulirkan wacana berupa usulan pengungkapan dan pelaporan berbasis sosial dan lingkungan, yang dalam hal ini terepresentasi pada bentuk *sustainability report*.

Namun, kemapanan konsep *enterprise theory* sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, dianggap Triyuwono (2001; dan 2004) masih perlu diperbaiki dikarenakan konsep ini belum mengakui *indirect participants* [26, 27]. Padahal secara normatif mereka tetap mempunyai hak atas nilai tambah yang diciptakan oleh perusahaan (Triuwo, 2002: 6) [28]. Beranjak dari hal itu, Triyuwono (2001; 2004) mengusulkan konsep *syar'iah enterprise theory* (SET) yang diyakini mampu meretaskan Allah SWT sebagai Maha Pencipta dan Maha Penguasa [29, 30]. Mulawarman (2011: 113-115) menambahkan dengan konsep ini juga mampu memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhannya sebagai sentral sumber amanah utama dan pemilik tunggal yang mutlak serta mewujudkan kembali koeksistensi dari alasan Tuhan menjadikan manusia sebagai perwakilannya di muka bumi yaitu sebagai *khalifatullah fil ardh* dan *abd' Allah* [31]. Kini konsep SET semakin menunjukkan keberhasilan, dimana telah berhasil menjadi konsep yang akan selalu menguatkan konsep filosofis teoritis-praktis dari akuntansi *syar'iah* yang idealis.

Menilik keberhasilan Triyuwono (2001; dan 2004) dalam memanifestasikan konsep entitas akuntansi dalam bingkai nilai-nilai syariah, membangun semangat penulis untuk melakukan hal yang sama yakni membangun konsep kepemilikan berdasarkan pada budaya Pancasila dan *local wisdom* bangsa Indonesia yaitu *Pancasila Enterprise Theory* (PET) [32, 33]. Perlu diketahui, konsepsi PET ini tidak lain dan tidak bukan adalah bagian dari upaya motivasi penulis untuk merealisasikan *conceptual framework* dalam rangka melahirkan praktik akuntansi Pancasila (Lihat Firdaus, 2016a; 2016b; 2016c) [34-36]. Sebagai tambahan nantinya, konsep PET juga akan didukung (*inheren*) dengan hadirnya konsep *Pancasila Bottom Line* (PBL) yang merupakan replikasi sekaligus rekonstruksi dari konsep Elkington (1997) yaitu *Triple Bottom Line* [37]. Replikasi ini lebih lanjut menjadi alternatif domain baru akuntansi yang berelasi dengan Tuhan sebagai upaya merangkai kekayaan nilai-nilai altruistik-spiritualis-humanis-ekologis yang terepresentasi pada nilai-nilai Pancasila.

Akhirnya, usaha perwujudan elemen-elemen seperti PET dan PBL memiliki nilai-nilai perjuangan dalam mereaktualisasikan trisakti budaya Pancasila khususnya pada poin berdikari di bidang ekonomi dengan bernafaskan nilai-nilai Pancasila seperti Ketuhanan, Kemanusiaan, Kesatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Selain itu, penggunaan sudut pandang Pancasila pada penelitian ini akan melahirkan wawasan atau paradigma baru dalam merekonstruksi hegemonian akuntansi modern yang universal, dalam rangka menggagas sistem akuntansi ke-Indonesia-an yang benar-benar lepas dari jerat kapitalisme.

2. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, Pancasila akan berperan sebagai nilai lain yang akan diinternalisasikan kedalam konsep entitas akuntansi dan konsep *the bottom line* sebagai upaya untuk merekonstruksi logosentrisme dari akuntansi modern. Upaya memanifestasi atau memasukkan nilai lain dari akuntansi *mainstream* tadi dapat disebut sebagai upaya dekonstruksi yang dikenalkan oleh Derrida (Triuwo, 2001: 6; dan O'Donnell, 2009: 56-57) [38, 39]. Proses ini kemudian akan menjadi konsep dan wawasan baru yaitu PET dan PBL sebagai diskursus aktual dalam rencana melahirkan akuntansi berbasis Pancasila.

Integrasi Pancasila kedalam konsep entitas ekonomi dan konsep *the bottom line* dimulai dalam dua tahap yaitu tahap teoritis dan tahap praktis. Kegiatan pada tahap analisis teoritis antara lain merumuskan masalah dan memilih metodologi, barulah kemudian melakukan penelusuran kerangka filosofis teoretis dari *proprietary theory*, *entity theory*, dan *enterprise theory*, *triple bottom line*, serta nilai-nilai dari setiap sila Pancasila, dan terakhir melakukan rekonstruksi filosofis-teoretis pada ketiga konsep entitas akuntansi tadi dan *triple bottom line* sehingga terbentuklah PET dan PBL. Selanjutnya, analisis empiris terdiri atas beberapa kegiatan yakni mengkaji lebih mendalam mengenai masalah yang berkaitan dengan penerapan ketiga konsep entitas akuntansi tadi, menafsir setiap makna dari sila-sila Pancasila serta perannya dalam berkehidupan dan bernegara, serta mereaktualisasikan Pancasila dalam proses akuntansi. Bahan-bahan dan informasi yang akan dianalisis pada bagian ini merupakan data-data sekunder yang peneliti peroleh dari berbagai sumber, bahan seminar, media masa, media elektronik, dan lain-lain yang kemudian didukung dengan kajian pustaka.

Analisis teoritis akan dimulai dengan melakukan reduksi data dengan memfokuskan perhatian pada pencarian materi penelitian dari berbagai literatur disertai dengan proses mengkritisi, mengevaluasi, menafsir, dan menarik kesimpulan konsep entitas akuntansi dan konsep *the bottom line* berdasarkan indikator-indikator yang bermuara pada nilai-nilai Pancasila. Sedangkan untuk analisis empiris, dilakukan dengan berinteraksi dengan beberapa informan yang telah penulis pilih secara sengaja, berdasarkan kriteria yang dijelaskan oleh Bungin (2010: 78), bahwa informan merupakan individu yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktivitas yang menjadi sasaran penelitian dengan berbagai pertimbangan baik melalui proses diskusi atau *sharing* [40].

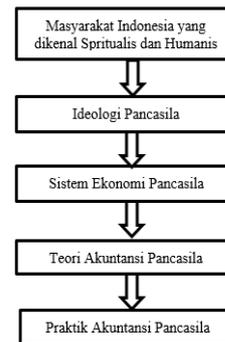
Selain itu, pemilihan informan juga didasarkan atas hubungan atau pendekatan emosional dengan peneliti. Kemudian, informan pada penelitian ini adalah orang-orang yang menguasai atau menjadikan Pancasila sebagai landasan keilmuannya dalam wujud *academic writing* dan mempunyai ketertarikan dengan ilmu akuntansi *non mainstream* atau *non-positivism*, agar mudah untuk saling bertukar informasi mengenai wacana aktual rekonstruksi ilmu akuntansi modern.

3. PEMBAHASAN

3.1 Akuntansi Pancasila: *The New Gold Era Of Accounting*

Dengan meminjam pendapat Suwardjono (2005) dapat diketahui bahwa akuntansi yang dipraktikkan dalam suatu wilayah negara sebenarnya tidak terjadi begitu saja secara alamiah, akan tetapi sengaja dirancang dan dikembangkan untuk mencapai tujuan tertentu [41]. Akibatnya, ruh dari akuntansi pun akan selalu senada dengan realitas sosial dimana akuntansi itu dipraktikkan (Morgan, 1988; Dilliard, 1991; dan Triyuwono, 2012) [42-44]. Alhasil, tidak heran bila kemudian struktur dan praktik akuntansi akan berbeda antar negara. Di Indonesia sendiri, di era sebelum masa penjajahan, sistem akuntansi yang digunakan bernuansa kerajaan, keagamaan, dan kearifan lokal. Namun, semua musnah ketika negara penjajah datang, dengan membawa berbagai aturan dan pemaksaan. (Sukoharsono dan Gaffikin 1993; Poesponegoro dan Djoened, 2008; dan Budiasih, 2012) [45-47]. Walaupun demikian, dilain pihak, usaha pengembalian akuntansi berwawasan ke-Indonesia-an kini terus digulirkan khususnya menggunakan perspektif Pancasila (Firdaus, 2016a; 2016b; 2016c; Parikesit, 2012; Ludigdo dan Kamayanti, 2012; dan Sitorus, 2015) [48-53].

Memang diakui, usaha menyusun kerangka konsep filosofis teoritis-praktis akuntansi berbasis ke-Indonesia-an (dalam hal ini lebih dispesifikkan pada nilai-nilai Pancasila) terbilang sulit mengingat proses penyusunan kerangka akuntansi kapitalis misalnya, terungkap bahwa dibutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun, melibatkan sekitar lima jenis ilmu pengetahuan, dan beberapa kali mengalami proses perbaikan (Harahap, 2001: 16; dan Muslim, 2015: 31) [54, 55]. Namun, jika memang ingin mewujudkan praktik dari akuntansi berbasis Pancasila, berikut tahapan yang harus dijalani dan dilewati (Firdaus: 2016a; 9-10) [56]:



Gambar 1. Proses Terjadinya Praktek Akuntansi Pancasila

Jika dilihat dari gambar diatas, praktik akuntansi Pancasila memang terwujud dari potret kepribadian masyarakat Indonesia yang dikenal spritualis dan humanis. Bahkan, kedua nilai ini pun dipercayai sebagai ruh yang melatarbelakangi terbentuknya Pancasila sebagai ideologi negara. (Soekarno, 1964a; 1964b; 2002) [57-59]. Di lain pihak, keberhasilan Pancasila sebagai peradaban bagi bangsa Indonesia tidak perlu dipertanyakan lagi. Kini, Pancasila telah berdiri kokoh dengan meyanggah gelar sebagai sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, hingga paradigma kehidupan di berbagai bidang seperti bidang ekonomi (Firdaus, 2016b) [60]. Lebih jauh, secara terang-terangan, keberhasilan Pancasila dalam bidang ekonomi membantu Indonesia dalam mempertahankan idealismenya dari dentuman dahsyat hegemoni antar dua kutub pemecah bangsa yaitu ekonomi kapitalisme dan sosialisme (Parikesit, 2012: 8) melalui sistem ekonomi Pancasila [61].

Perlu untuk diketahui, diskursus mengenai konsep sistem ekonomi Pancasila secara garis besar telah di canangkan oleh Mohammad Hatta, yang diberikan sentuhan agar menjadi lebih berkembang oleh Emil Salim dan Mubyantoro (Firmansyah, 2011) [62]. Corak ekonomi yang dibangun melalui sistem ini tidak berfokus pada pemenuhan materi tetapi lebih berusaha untuk menciptakan keseimbangan antara aspek materi dan non materi seperti mentransformasikan nilai-nilai keTuhanan, kemanusiaan, dan keadilan dalam proses harmonisasi dan humanisasi sebagai wujud pribadi yang utuh. Hal ini tentu berbeda dengan sistem ekonomi konvensional yang sarat akan *self-interest*. Sistem ekonomi Pancasila juga mengutamakan etika dan moral sebagai cerminan dari sila Pancasila dan berusaha keras menegaskan penindasan sebagai kekuatan revolusioner dalam upaya menuju perubahan sosial yang semestinya (Hatta, 1993; Swasono, 2008; 2010; dan Firmansyah, 2011) [63-66]. Lindayanti (2007) menambahkan bahwa basis dari sistem ekonomi Pancasila sebenarnya adalah moralitas agama, titah Tuhan, dan keadilan yang digambarkan dengan pemerataan sosial dan kerakyatan [67].

Dogma sistem ekonomi Pancasila yang seutuhnya berbasis spritualis dan humanis ini akan menjadi pilar dan terobosan baru di bidang akuntansi, dalam merekonstruksi teori akuntansi positif yang terlalu bersifat maskulin (Hines, 1989; dan Triyuwono, 2012) [68, 69]. Sifat maskulinitas ini

memang mengorbit pada budaya *private cost/benefits*, yang orientasinya adalah kepentingan *shareholder*, sehingga dimensi non materi seperti lingkungan jarang sekali dipandang. Selain itu, dimensi sosial juga terkadang turut termaginalkan, sehingga pernyataan “memanusia manusia” hanyalah sebuah wacana. Hal ini teresentasi dari budaya perusahaan yang memberikan upah buruhnya yang tidak sesuai dengan *effort* nya (Firdaus, 2012c: 3) [70]. Melihat segala jenis penindasan yang terjadi sebagai akibat sistem akuntansi yang terjerat nilai maskulinitas tadi, adalah penting kemudian memberikan ruang kepada Pancasila untuk ambil peran sebagai pahlawan dengan mewujudkan diskursus aktual teori akuntansi Pancasila. Adapun konsep teori akuntansi yang sesuai dengan Pancasila dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 2. Konsep Teori Akuntansi Pancasila

Nilai-nilai seperti keTuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan akan selalu melekat pada jiwa sistem ekonomi Pancasila dan teori akuntansi Pancasila. Alhasil, kelima nilai tersebut merupakan kerangka dasar operasional dalam pada prinsip teori akuntansi Pancasila. Nilai keTuhanan merupakan sumber spritualitas dan moralitas guna menghadirkan Tuhan dalam relung jiwa akuntansi dan jiwa pemakainya. Nilai kemanusiaan akan membangun trilogi keeksistensian akuntansi yang mampu memperbaiki pendekatan emosional pemakainya dengan Tuhan, antar sesama, dan lingkungannya. Selanjutnya, nilai kesatuan akan mawadahi dan memfasilitasi akuntansi dalam menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan kemajemukan bangsa sebagai upaya preventif munculnya potensi disintegrasi dikalangan pemakainya. Teori akuntansi Pancasila juga menginginkan segala jenis pengambilan keputusan oleh pemakainya selalu didasari dengan asas kebijaksanaan yang hikmat dengan mengutamakan kepentingan hajat hidup orang banyak melalui revitalisasi nilai kerakyatan. Akhirnya, orientasi pengambilan keputusan pada kepentingan hajat hidup orang banyak yang dipandu oleh hikmah kebijakan akan berimplikasi pada perwujudan keadilan sosial. Cara pandang dengan kelima nilai tadi, akan membuat sebuah akuntansi baru (akuntansi Pancasila) yang benar-benar bernuansa holistik (*holistic approach*) dan bersifat vertikal-transedental dan horizontal-humanisasi.

Keholistikan teori akuntansi Pancasila dalam membangun konsep filosofis akuntansi (Pancasila)

membawa warna baru dimana terlihat ada proses integrasi nilai-nilai spritualis, sosial, dan ekologis. Alhasil, akuntansi Pancasila memiliki beberapa tujuan seperti penggunaan konsep akuntansi haruslah berefleksi dan berorientasi pada agama sebagai wujud dari sila pertama, sehingga para pengguna dapat bertanggungjawab kepada Tuhan dan Makhhluk-Nya. Tujuan kedua berelevansi dengan sila kedua yaitu konsep akuntansi tidak boleh mengandung nilai-nilai yang menimbulkan kegiatan yang sifatnya memaksa kehendak orang lain seperti pemerasan. Selanjutnya, penerapan akuntansi dilakukan semata-mata untuk meningkatkan rasa kekeluargaan dan gotong royong. Penerapan konsep akuntansi dalam bentuk pengambilan keputusan juga harus mengutamakan hajat hidup orang banyak sehingga tidak sarat akan nilai egoistik, individualistik, dan kapitalistik. Dan yang terakhir, tujuan dari akuntansi ialah sebagai alat untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban pemakainya sebagai makhluk Tuhan.

3.2 Modifikasi Konsep *Enterprise Theory* Melalui Pendekatan Pemaknaan Ulang *Stakeholders* Dalam Cakupan Vertikal-Horizontal

Melalui gambar dua pada poin sebelumnya, melahirkan praktik dari akuntansi Pancasila membutuhkan sebuah konsep dasar entitas yang kemudian disebut dengan PET. Mengapa kemudian konsep ini begitu fundamental? Hal ini berangkat dari sebuah pemikiran, bahwa sesuatu yang berasal dari budaya barat tidak sepenuhnya sesuai dan bisa diterapkan oleh mereka yang berbudaya timur, maka secara sederhana, *enterprise theory* perlu dimodifikasi agar konsep teoritis hingga praktisnya mampu berwawasan ke-Indonesia-an. Maka daripada itu, menurut Saputro dan Triyuwono, (2009), konsep ini membutuhkan proses replikasi seperti perlu adanya upaya mengakomodir pengakuan terhadap *indirect participants*, karena secara normatif mereka tetap mempunyai hak atas nilai tambah yang diciptakan oleh perusahaan seperti yang diungkapkan oleh Triyuwono (2002) [71, 72]. *Indirect participant* yang menjadi fokus utama dari pemikiran Triyuwono (2002; dan 2012) ini adalah Tuhan [73, 74]. Artinya, Triyuwono (2002 dan 2012) memandang bahwa agenda mereplikasi dari konsep *enterprise theory* menjadi *syari'ah enterprises theory* menghendaki segala jenis komponen pelaporan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan sebagai *Manunggaling Kawulo Gusti* agar sifat kapitalisme dari rahim *enterprise theory* tadi dapat larut dalam bingkai agama [75, 76]. Secara terminologis kehadiran konsep *syari'ah enterprise theory*, semata-mata untuk mewujudkan kembali koeksistensi dari alasan Tuhan menjadikan manusia sebagai perwakilannya di muka bumi yaitu sebagai *khalifatullah fil ardh* dan *abd' Allah* (Mulawarman, 2011) [77].

Upaya menghilangkan nilai kapitalisme seperti yang dilakukan Triyuwono melalui konsep *syariah enterprise theory*, juga dapat diwujudkan dengan cara berbeda. Misalnya dengan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila kedalam konsep *enterprise theory*, sehingga menghasilkan sebuah teori baru yang dapat disebut sebagai *Pancasila Enterprise Theory*. Hal ini dapat saja dilakukan mengingat

Pancasila telah bisa dikatakan sebagai ilmu pengetahuan karena telah memenuhi syarat postulat ontologi, epistemologi, hingga aksiologi dan telah memiliki empat tiang penyangga ilmu yaitu objek, metode, sistematika dan argumentasi (Ardi, 2012, p. 5; dan Mardiana, 2016, p. 7) [78, 79]. Alhasil, internalisasi Pancasila kedalam *enterprise theory* bisa menjadi solusi konkret dan efektif dalam rangka mewujudkan praktik akuntansi yang berbasis Pancasila.

Proses internalisasi ini akan melibatkan nilai-nilai yang merepresentasikan dari setiap masing-masing sila dari Pancasila seperti nilai keTuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan, dan keadilan. Aksioma terpenting yang ingin dicapai dari konsep ini adalah terbentuknya pola akuntansi yang lebih mengutamakan asas kritis pemakainya sehingga memahami keberadaan akuntansi secara lebih holistik dengan segala jenis potensi kecerdasannya, menyerap nilai-nilainya dengan ketulusan, mengimplementasikannya dengan penuh keikhlasan, dan menyebarkannya dengan keyakinan. Dengan penuh kesadaran, akhirnya para pemakai akuntansi pun menjadi sadar bahwa dirinya adalah perwakilan Tuhan di muka bumi, sehingga ia akan berusaha keras untuk bertindak berdasarkan asas profesionalitas, responsif dan solutif dalam menanggapi isu lingkungan dan sosial, memperjuangkan hak dan keadilan bersama, dan mewujudkan budaya transparansi sebagai proses bertanggungjawab kepada seluruh *stakeholder* yang ada. *Stakeholder* yang dimaksud pada penelitian ini mengacu kepada konsep *stakeholder* menurut Firdaus (2016c: 29) [80]:

Tabel 3: Pemaknaan Ulang Kata *Stakeholder* dalam Bingkai Pancasila

Sila	Pemaknaan Ulang Kata <i>Stakeholder</i>
I	Konsep <i>stakeholder</i> yang BerkeTuhanan adalah mengakui Tuhan sebagai pemilik hak tunggal dan hak mutlak atas segala sesuatu yang ada di alam semesta ini.
II	Konsep <i>stakeholder</i> yang Berkemanusiaan adalah mengakui bahwa manusia memiliki hak kepemilikan atas suatu objek menurut dasar Ketuhanan melalui proses “memanusiakan manusia” tanpa mengindahkan faktor lingkungan
III	Konsep <i>stakeholder</i> yang bersatu adalah mengakui bahwa manusia memiliki hak kepemilikan atas suatu objek guna mencapai persaudaraan tanpa mengindahkan faktor lingkungan
IV	Konsep <i>stakeholder</i> yang berkerakyatan adalah mengakui bahwa manusia memiliki hak kepemilikan atas suatu objek guna mengangkat derajat rakyat dengan semangat kekeluargaan tanpa mengindahkan faktor lingkungan
V	Konsep <i>stakeholder</i> yang berkeadilan adalah mengakui bahwa manusia memiliki hak kepemilikan atas suatu objek guna menyeimbangkan kebutuhan jasmani dan rohani tanpa mengindahkan faktor lingkungan

Sumber: Firdaus (2016c: 29)

Jika dilihat dari maksud dan tujuan dari PET maka dapat digambarkan bahwa ada harapan dengan akuntansi Pancasila, para pemakainya akan dapat mencapai makna

akuntabilitas secara maksimal kepada *stakeholder* yang akan bermuara pada dimensi spritualitas (Tuhan), sosial (antar sesama manusia), dan ekologis (lingkungan). Ketercapaian makna akuntabilitas disini adalah sebuah premis utama bahwa segala tindakan yang dilakukan manusia harus mencerminkan sifat kebijaksanaan mengingat mereka adalah seorang pemimin dan telah diberikan mandat dari Tuhan untuk mengelola sekaligus menjaganya.

Lebih jauh, konsep PET terbilang lebih luas dari konsep *enterprise theory* terutama dalam memandang kepada siapa saja mereka harus bertanggungjawab, yang dalam hal ini terangkum dalam istilah *stakeholder*. Pada *enterprise theory*, makna akuntabilitas cakupannya hanyalah berada pada tataran horizontal yaitu antara manusia dengan manusia lain seperti pemerintah, *shareholders*, dan masyarakat sekitar. Namun, pada konsep PET, makna akuntabilitas mencakup horizontal-vertikal. Kata vertikal disini terdiri atas dua jenis, layaknya sumbu y pada titik koordinat matematika, dimana ada vertikal kebawah dan vertikal keatas. Makna dari vertikal kebawah melambangkan pusat tanggungjawab manusia kepada lingkungannya, sedangkan vertical keatas melambangkan pusat tanggungjawab manusia kepada Tuhannya. Hal ini hampir mirip dengan konsep *indirect stakeholders* dan *direct stakeholders* pada pemikiran Triyuwono (2002) [81].

Dengan konsep PET, akan menggiring akuntansi Pancasila memiliki konsekuensi secara substansial dan konsekuensi teknis. Konsekuensi substansial diharapkan akan membangun jiwa-jiwa pemakai akuntansi yang memiliki sifat cinta dan tunduk atas kebesaran Tuhannya disertai dengan cinta terhadap negara nya sendiri. Alhasil, para pemakai akuntansi memiliki pandangan bahwa dirinya harus berdaya juang, bersinergi, mengabdikan, bekrya, dan berdidikasi tinggi untuk negaranya tanpa mendistorsikan nilai-nilai sosial dan lingkungan.

Kemudian, konsekuensi secara teknis, PET akan berjuang menjadikan dirinya sebagai landasan para pemakai akuntansi dalam bersikap (*act*) melalui proses perhitungan atau kalkulasi dalam bentuk angka (*count*) dan proses pengambilan keputusan (*think*) (Firdaus, 2016b: 6) [82]. Kegiatan *act*, *count*, dan *think* tadi akan diterjemahkan sebagai praktek dari akuntansi Pancasila yang mengorbit pada lima jenis teknik akuntansi Pancasila yaitu *responsible to The God, Humans, and the Enviroment, materialistic and egoistic minimization, income distribution maximization, justice smoothing, dan non-financial perspective recognition* (Firdaus, 2016b: 7) [83]. Kelima jenis teknik akuntansi Pancasila inilah yang kemudian menjadi langkah revolusioner guna menghadirkan konsep *Pancasila Value Added Statement* sebagai bentuk konkret dari praktik akuntansi Pancasila.

3.3 PBL: Turunan Pancasila Enterprise Theory Sebagai Upaya Merentas Praktik Akuntansi Pancasila

PBL hadir menjadi pribadi yang berfungsi untuk menyokong kesempurnaan dari konsep PET. Keeksistensian PBL sebagai sebuah karya dari hasil turunan PET akan lebih menitikberatkan pada bagaimana membuat konsep filosofis akuntansi Pancasila agar mampu menjawab

tantangan kekinian dan harapan kedepan dunia sosial. Artinya, ada sebuah keinginan untuk mendobrak peradaban lama yang hanya bersifat *profit oriented* atau realtias yang terencana. Inilah kemudian yang disebut dengan usaha menenggelamkan konsep *single bottom line*.

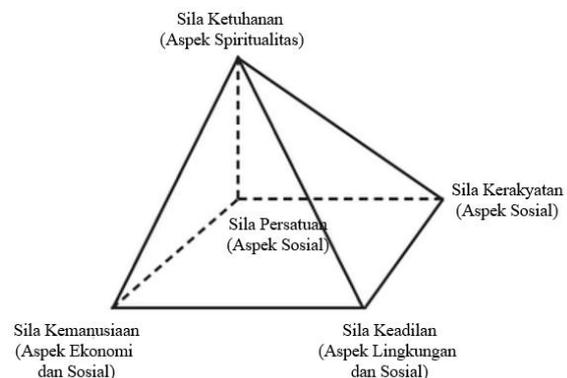
PBL sendiri sebenarnya adalah buah pemikiran peneliti dalam mengkritik *single bottom line* seperti halnya yang dilakukan oleh Elkington (1997) dengan konsep *triple bottom line* (TBL) yang memberikan hamparan keseharian berupa keserakahan [84]. Dengan PBL, selanjutnya ada harapan bahwa nantinya praktek akuntansi Pancasila benar-benar akan membawa cahaya kebaikan yang tak luput atas proses bagaimana mendisiplinkan ilmu akuntansi yang peduli akan nilai-nilai sosial dan lingkungan, bahkan hingga nilai transedental-spiritualitas.

Jika ditanya, dimana letak perbedaan konsep PBL dengan konsep TBL yang telah diterjemahkan oleh Elkington (1997) [85], setidaknya ada beberapa jawaban yang bisa dijelaskan. Pertama ialah ruh dari konsep PBL benar-benar diterjemahkan dari bentuk sila-sila Pancasila, sehingga wawasannya terbilang mampu mewakili kepribadian bangsa Indonesia yang humanis dan spritualis. Kedua, konsep PBL bersifat lebih holistik, lebih siap, dan lebih serius untuk memberikan ruang sekaligus menaungi unsur-unsur minoritas yang sebelumnya termaginalkan. PBL juga akan menjadi premis tujuan akuntansi Pancasila yang memberikan perhatian pada isu-isu dalam pandangan mikro-ekonomi berupa aspek sosial dan ekologis. Konkretnya, pada aspek sosial, PBL akan membantu akuntansi Pancasila dalam mengkodifikasi nilai-nilai dari sila Pancasila yang berelfleksi dengan proses berkehidupan dan bernegara misalnya mengungkap nilai-nilai hak asasi manusia seperti biaya non diskriminasi, kebebasan berpendapat, tenaga kerja dibawah umur, hak penduduk pribumi, dll. Sedangkan untuk aspek lingkungannya, seperti masalah biodiversitas yang dimanfaatkan, jumlah energi yang digunakan, ataupun biaya polusi.

Ketiga adalah konsep PBL akan mengutamakan zat yang tidak akan pernah mati yaitu Tuhan (aspek spritualitas). Adalah sangat penting kemudian PBL berusaha ingin merentas Tuhan dalam praktek akuntansi Pancasila, mengingat PBL dari nilai-nilai Pancasila yang sangat mengidamkan-idamkan ketitahan Tuhan (representasi sila pertama). Ketitahan Tuhan adalah model terobosan atau generasi baru yang harus diteropong para pengguna akuntansi (Pancasila khususnya). Sepakat atau tidak, sebagai makhluk-Nya kita sudah sebaiknya meyakini bahwa aspek spritualitas ikut berperan penting dalam pergerakan dan perkembangan sebuah organisasi. Artinya, aspek ini hadir disetiap nafas aktivitas organisasi. Makna Tuhan sebagai dimensi yang maha dahsyat juga tentunya akan memberikan energi postif bagi setiap elemen perusahaan dalam proses penyeimbangan atas apa yang telah dilakukan. Akhirnya, tidak berlebihan jika bentuk *holy-spirit* seorang manusia terhadap Tuhannya akan lebih baik jika diungkapkan pada pelaporan akuntansi dengan indikator yang diprakarsai oleh Sukoharsono (2010: 18) seperti kasih yang tulus (*merciful*), cinta yang tulus (*truthful love*), kesadaran transedental, kemampuan kontemplasi diri dan kejujuran [86].

Tiga jenis perbedaan antara konsep PBL dengan konsep TBL versi Elkington (1997) [87] terjadi sebagai akibat implikasi dari adanya proses internalisasi sila-sila Pancasila kedalam tubuh TBL. Hakikat dari kelima sila ini kemudian akan membentuk jiwa PBL yang secara komprehensif memiliki wawasan yang holistik. Melalui sila pertama mengidentifikasi bahwa PBL memiliki aspek spritualitas. Alhasil, PBL akan menjadi *guidance* bahwa tujuan utama perusahaan melakukan proses bisnis adalah untuk mencari ridho Tuhannya.

Sila kedua yaitu kemanusiaan melambangkan bahwa PBL selain fokus pada aspek ekonomi juga memperhatikan masalah sosial untuk bertahan hidup. Disamping hal itu, sila ketiga, keempat dan kelima juga akan fokus pada tataran sosial seperti adanya sinergitas antara perusahaan dan masyarakat sebagai makhluk sosial (sila ketiga), setiap tindakan yang akan diambil (para manajer) perusahaan haruslah bijaksana dan mengutamakan hajat hidup orang banyak (sila keempat), adanya perubahan pola pikir pada perusahaan bahwa melakukan aktifitas sosial tidak diperlakukan sebagai beban atau biaya, tetapi adalah sebuah ibadah untuk menggapai kepuasan batiniah dan rohaniah yang tidak dapat diukur secara material (sila kelima). Namun, sila kelima atau keadilan juga akan fokus pada bagaimana perusahaan berperilaku adil dengan lingkungannya selain manusia itu sendiri seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan sebagai makhluk ciptaan-Nya (Firdaus, 2016a: 15) [88]. Apabila konsep PBL melalui kelima sila ini diterapkan dengan penuh rasa keikhlasan oleh setiap pelaku bisnis maka cepat atau lambat akan ada energi positif yang akan mereka rasakan saat, sebelum, ataupun setelah proses kegiatan bisnis.



Gambar 4. Pancasila Bottom Line

Hal tersebut dapat dianalogikan pada praktik akuntansi konvensional dimana perusahaan memiliki perilaku opportunistik dalam memperlakukan akun pendapatan, beban, dan laba. Akuntansi konvensional berasumsi bahwa pendapatan dan laba adalah sesuatu yang positif dan harus ditingkatkan sedangkan beban atau biaya adalah sebaliknya. Asumsi ini pula yang memprovokasi perusahaan berlomba-lomba untuk berusaha meningkatkan nilai pendapatan atau laba dan menurunkan nilai beban dengan berbagai cara. Perilaku semacam ini dikenal dengan istilah manajemen laba atau akuntansi kreatif (Sugiarto, 2003; dan Firdaus, 2016b: 1-2) yang kemudian menyebabkan terjadi *disfunctional behaviour*. Tidak heran jika kemudian

perilaku ini menyebabkan masalah-masalah baru seperti pencemaran lingkungan, tindakan diskriminatif, dll [89, 90].

Hal ini tentu berbeda dengan konsep PBL secara substansial yang telah dijelaskan pada paragraph sebelumnya. Konsep PBL akan mendidik perusahaan untuk menganggap bahwa pendapatan, laba, bahkan beban adalah sesuatu yang memberikan dampak positif (*positive impacts*). Secara singkat, beban dalam konsep PBL dianggap sebagai suatu proses pendewasaan pada perusahaan dalam bertindak. Konkretnya, beban dianggap sebagai aktivitas menebar kebermanfaatannya berupa kesejahteraan terhadap lingkungannya (baik kepada antar sesama manusia/*human balance sheet* atau kepada makhluk lainnya/*environmental balance sheet*) yang wujud nyatanya adalah bentuk beribadah kepada Tuhan (Firdaus, 2016a: 16) [91]. Melihat kenyataan tersebut, nyata sekali bahwa konsep PBL ini tentu ingin meruntuhkan dan memporakporandakan dominasi akuntansi mainstream dengan corak kapitalisme, berusaha untuk memperbaikinya dengan apa yang disebut dengan tindakan berkesadaran Tuhan. Inilah yang kemudian disebut dengan *the new era of accounting*, dengan Pancasila sebagai tonggakunya.

4. KESIMPULAN

Kepragmatisan sistem akuntansi Indonesia untuk selalu tunduk pada perintah akuntansi mainstream sebagai akibat proses penyusunan yang dilakukan melalui mekanisme adaptasi tanpa perubahan bearti dari IFAC dan IASC, setidaknya dapat diteropong dari empat konsep dasar akuntansi seperti harga pertukaran (*historical cost*), penandingan beban dengan pendapatan (*matching cost against revenue*), pengukuran dalam satuan uang (*monetary measurement unit*), dan konsep entitas akuntansi (*entity accounting*). Keempat konsep dasar ini kemudian menjadi jebakan sosiologis bagi Indonesia, karena akan menghantarkan mereka menuju sistem akuntansi kapitalis yang sarat akan nilai-nilai egoistik, materialistik, maskulin, dan *private*.

Berkaca dari hal tersebut, menjadi penting kemudian untuk memerdekakan sistem akuntansi Indonesia agar lepas dari jerat akuntansi kapitalis melalui wawasan atau paradigm baru yakni budaya Pancasila sebagai kearifan lokal bangsa Indonesia. Revitalisasi Pancasila dalam membangun peradaban baru domain akuntansi Pancasila secara teoritis hingga praktis disinyalir akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Terlepas dari itu, yang menjadi fokus sekarang adalah bagaimana cara membangun teori akuntansi berbasis Pancasila secara masif dan konkret.

Setidaknya, pada penelitian ini, langkah yang diambil peneliti adalah dengan membangun konsep PET dan PBL. Misi utama dari konsep PET dan PBL ialah merekonstruksi akuntansi agar lebih berorientasi pada kepentingan yang lebih holistik, sehingga adanya pergeseran cara berpikir oleh pengguna akuntansi dari sekularisme ke spritualisme, paradigma antroposentrisme ke biosentrisme, pergeseran pandangan materialisme ke altruistik. Misi utama PET dan PBL tadi akan diekspresikan dalam bentuk laporan keuangan yang bernama laporan pertanggungjawaban kepada Tuhan dan Makhluknya sebagai tanda lahirnya *the*

new gold era of accounting based on Pancasila yang bisa kita sebut dengan akuntansi Pancasila yang telah merdeka dari jeratan kapitalisme. Merdeka Akuntansi ku, Merdeka Negaraku!!!

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Nurafni Eltivia dan Yunia Afiatin yang telah memberikan masukan dan sekaligus saran terkait penambahan refrensi yang menunjang penulisan artikel ini secara substansi. Di samping itu, Saya juga mendidikasikan artikel ini kepada seluruh peserta sekaligus panitia Kongres Pancasila VIII atas semangat dan inspirasi yang diberikan sehingga Saya selalu berusaha aktif mengkaji dan membangun ulang konsep akuntansi Pancasila.

DAFTAR PUSATAKA

- [1] [9] [13] [22] [31] [77] Mulawarman, A. D. "Akuntansi Syariah: Teori, Konsep, dan Laporan Keuangan" in *E-Publishing Company*, Jakarta, 2011.
- [2] [52] Ludigdo, Unti, and Ari Kamayanti. "Pancasila as Accountant Ethics Imperealism Liberator" in *World Journal of Social Sciences*, vol.2, no. 6, pp. 159-168, 2012.
- [3] Agus, Sukrisno, and Ardana, I Cenik. "Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya" in *Salemba Empat*, Jakarta, 2004.
- [4] [10] [18] Belkaoui, Ahmad Riahi. "Teori Akuntansi" in *Salemba Empat*, Jakarta, 2000.
- [5] [15] [24] Kam, Vernon. "Accounting Theory. Second edition" in *John Wiley and Sons*, New York, 1990.
- [6] Hendriksen, Eldon, S. "Teori Akuntansi" in Erlangga, Jakarta, 1994.
- [7] [26] [29] [32] [38] Triyuwono, I. "Metafora Zakat dan Syariah Enterprise Theory sebagai Konsep Dasar dalam Membentuk Akuntansi Syariah" in *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, vol. 5. no. 2, pp. 131-145, 2001.
- [8] [19] [41] Suwardjono. "Teori Akuntansi: Perencanaan dan Pelaporan Keuangan" in *BPPE*, Yogyakarta, 2005.
- [9] [23] Tuanakotta, T. M. "Teori Akuntansi" in *LPFE-UI*, Jakarta, 1986.
- [11] [16] [21] [28] [72] [75] [73] [81] Triyuwono, I. "Sinergi Oposisi Biner: Formulasi Tujuan Dasar Laporan Keuangan Akuntansi Syariah. Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami I" in *PPPEI*, FE-Universitas Islam Indonesia, 2002.
- [12] Godfrey, Hodgson, H. "Accounting Theory 7th Edition" in *Wiley*, Australia, 2010.
- [17] Anthony, Robert N, David F. Hawkins, and K. A. Merchant. "Accounting: Text and Case" in *McGraww-Hill*, Bouston, 2003.
- [20] Djajaneegara, Moermahadi Soerja. "Menuju Good Corporate Governance: Suatu Kajian Empiris" in *Kesatuan Press*, Bogor, 2008.
- [22] Setiabudi, Hendri Y, and Iwan Triyuwono. "Akuntansi Ekuitas: Dalam Narasi Kapitalisme, Sosialisme, dan Islam" in *Salemba Empat*, Jakarta, 2002.
- [25] Harahap, S. S. "Beberapa Dimensi Akuntansi: Menurut Alquran, Illahiyah, Sejarah Islam, dan Kini" in *Media Riset Akuntansi, Auditing, dan Informasi*, vol. 2, No. 2, pp. 57-101, 2002.
- [27] [30] [33] Triyuwono, I. "Formulasi Karakter Laporan Akuntansi Syariah dengan Pendekatan Filsafat Manunggaling Kawulo Gusti (Syekh Siti Jenar)", in

- Prosiding Simposium Nasional Sistem Ekonomi Islami II*, PPBEI, Universitas Brawijaya Malang, 2004.
- [34] [48] [56] [88] [91] Firdaus, Arrayyan. "Diskursus Aktual Akuntansi Pancasila: Merenda Rajut Oase Akuntansi Sosial Dan Lingkungan Bernuansa Pancasila" in *Prosiding Paper 2nd National Seminar on Accounting and Finance*, Universitas Negeri Malang, 2016a.
- [35] [49] [60] [82] [83] [90] Firdaus, Arrayyan. "Manifestasi Pancasila Dalam Bingkai Akuntansi Kreatif Sebagai Upaya Menuju Akuntansi Ke-Indonesia-an Berwawasan Holistik-Ekologis" in *Prosiding Paper Seminar Nasional Akuntansi Manajemen dan Keuangan*, Politeknik Negeri Malang, 2016b.
- [36] [50] [70] [80] Firdaus, Arrayyan. "Mengaksikan Wacana Akuntansi Berfalsafah Pancasila Melalui Dekonstruksi Makna Stakeholders: Kritik Atas Kapitalisme" in *Prosiding Paper Kongres Pancasila VIII*, Universitas Gajah Mada, 2016c.
- [37] [84] [85] [87] Elkington, John. "Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business" in *Capstone Publishing*, Oxford, 1997.
- [39] O' Donnel. "Postmodernisme" in *Kanisius*, Yogyakarta, 2009.
- [40] Bungin, B. "Penelitian Kualitatif: Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya" in *Kencana Prenada Media Group*, Jakarta, 2010.
- [42] Morgan, G. "Accounting as Reality Construction: Towards a New Epistemology for Accounting Practice" in *Accounting, Organizations, and Society*, vol. 13. No. 5, pp. 477-85, 1988.
- [43] Dillard, Jesse F. "Accounting as a Critical Social Science" in *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, vol. 4, no. 1, pp. 8-28, 1991.
- [44] [69] [74] [76] Triyuwono, I. "Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori" in *Rajawali*, Jakarta, 2012.
- [45] Sukoharsono, E. G, and Gaffikin, M. "The Genesis of Accounting in Indonesia: The Dutch Colonialism in the Early 17th Century in *The Indonesian Journal of Accounting and Business Society*, vol. 3, no. 1, pp. 4-26, 1993.
- [46] Poesponegoro, and Djoened, M. "Sejarah Nasional Indonesia IV" in *Balai Pustaka*, Jakarta, 2011.
- [47] Budiasih, I. G, and Sukoharsono, E. G. "Accounting Practices and the Use of Money in the Reign of King Udayana in Bali: An Ethnoarcheological Approach" in *Simposium Nasional Akuntansi 15*, Banjarmasin, 2012.
- [51] [61] Parikesit, Bonifasius S. "Dekonstruksi Laba Dalam Perspektif Pancasila", in *thesis Bachelor of Science Program*, Malang: Universitas Brawijaya, 2012.
- [53] Sitorus. "Dekonstruksi Definisi Akuntansi Dalam Perspektif Pancasila, (Online) in www.multiparadigma.lecture.ub.ac.id, 2015.
- [54] Harahap, S. S. "Menuju Perumusan Teori Akuntansi Islam" in *Pustaka Quantum*, Jakarta, 2001.
- [55] Muslim, Sarip. "Akuntansi Keuangan Syariah: Teori dan Praktik" in *Pustaka Setia*, Bandung, 2015.
- [57] Soekarno. (1964a). *Camkan Pancasila! Pancasila Sebagai Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Departemen Penerangan RI.
- [58] Soekarno. (1964b). *Di bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- [59] Soekarno. (2002). *Lahirnya Pancasila*. Jawa Barat: PT. Visi Gagas Komunikasi (Vision 03).
- [62] [66] Firmansyah, Ilham. "Konsep Ekonomi Pancasila Dan Ekonomi Islam (Analisis Pemikiran Ekonomi Sri-Edi Swasono)", *working paper*, 2011.
- [63] Hatta, Mohammad. "Persoalan Ekonomi Sosialis Indonesia" in *Djambatan*, pp. 1-29, 1963.
- [64] Swasono, Sri-Edi. "Mewaspada Neoliberalisme tentang Kerakyatan dan Demokrasi Ekonomi", in *BAPPENAS*, 2008.
- [65] Swasono, Sri-Edi. "Ekspose Ekonomika Mewaspada Globalisasi dan PasarBebas Cetakan V" in *PUSTEP-UGM*, Yogyakarta, 2010.
- [67] Lindayanti, Wiwin. "Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Pancasila (Studi Perbandingan Pandangan M. Umer Chapra dan Mubyarto)" *unpublished*, 2007.
- [68] Hines, Ruth D. "The sociopolitical paradigm" in *financial accounting research, Accounting, Auditing, and Accountability Journal*, vol. 2, no. 1), pp. 52-76, 1989.
- [71] Saputro, A. D., and Triyuwono, I. "Koreksi Konsep Nilai Tambah Syari'ah: Menimbang Pemikiran Konsep Dasar Teoritis Laporan Keuangan Akuntansi Syari'ah" in *Simposium Nasional Akuntansi 12*, Palembang, 2009.
- [78] Ardi, Mulia. "Etika Perpajakan Berbasis Etika Pancasila" in *Jurnal Madani*, Vol. I, 2012.
- [79] Mardiana. "Urgensi Pemahaman Pancasila Secara Holistik Bagi Semua Profesi Dan Khususnya Bagi Para Pembuat Peraturan Dan Penentu Kebijakan Di Indonesia "Dalam Upaya Pengembalian Pancasila Kepada Fungsi Sebenarnya", *working paper*, 2016.
- [86] Sukoharsono, E. G. "Metamorfosis Akuntansi Sosial dan Lingkungan: Mengkonstruksi Akuntansi Sustainability Berdimensi Spiritualitas" in *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*, Malang, 2012.
- [89] Sugiarto, Sopa. (2003). *Perataan Laba Dalam Mengantisipasi Laba Masa Depan Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Prosiding Paper Pada Simposium Nasional Akuntansi VI